

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem evaluasi kinerja pengurus Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih objektif dan terukur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang. Permasalahan utama belum adanya sistem penilaian kinerja yang terstandarisasi dan berbasis data kuantitatif. Untuk mengatasi hal ini, penelitian mengimplementasikan kombinasi metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk menentukan bobot indikator dan *Simple Additive Weighting (SAW)* untuk melakukan pemeringkatan kinerja.

Data yang digunakan mencakup 15 indikator kinerja dari 60 SKPD selama periode 2022-2024, yang meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengawasan, dan rekonsiliasi BMD. Proses analisis dilakukan secara komputasional menggunakan *Python* pada platform *Google Colab* untuk memastikan akurasi dan efisiensi perhitungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator Kehadiran Rekonsiliasi memiliki bobot tertinggi (20,51%), diikuti oleh Ketepatan Penyampaian RKBMD (9,78%) dan Kesesuaian Data RKBMD (9,71%). Pada aspek pemeringkatan, SKPD seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Perumahan Rakyat secara konsisten menempati peringkat teratas, sementara beberapa kecamatan menunjukkan kinerja yang masih perlu ditingkatkan.

Temuan ini memberikan implikasi praktis berupa rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem pengelolaan BMD, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyempurnaan sistem pelaporan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Sistem evaluasi ini juga dapat diadopsi oleh daerah lain dengan karakteristik serupa, sekaligus menjadi dasar pengembangan sistem informasi BMD yang lebih terintegrasi di masa depan

Kata Kunci: AHP, Barang Milik Daerah, Penilaian Kinerja, SAW, Tata Kelola Aset

ABSTRACT

This study aims to develop a more objective and measurable performance evaluation system for regional asset managers (Barang Milik Daerah, BMD) within the Karawang Regency Government. The main issue addressed is the absence of a standardized performance assessment system based on quantitative data. To resolve this, the study integrates the Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine indicator weights and the Simple Additive Weighting (SAW) method to rank performance.

The dataset comprises 15 performance indicators across 60 local government work units (SKPD) over the period 2022–2024, covering aspects of planning, administration, safeguarding, supervision, and BMD reconciliation. The analysis was conducted computationally using Python on the Google Colab platform to ensure calculation accuracy and efficiency.

The results indicate that the Reconciliation Attendance indicator holds the highest weight (20.51%), followed by Timeliness of RKBMD Submission (9.78%) and RKBMD Data Accuracy (9.71%). In the ranking aspect, SKPD such as the Civil Service Police Unit, Health Office, and Public Housing Office consistently ranked at the top, while several sub-districts exhibited performance requiring improvement.

These findings offer practical implications in the form of policy recommendations for improving BMD management systems, including capacity building, refinement of reporting mechanisms, and optimization of information technology. The evaluation system may also be adopted by other regions with similar characteristics and serve as a foundation for developing a more integrated BMD information system

Keyword : AHP, Regional Assets, Performance Evaluation, SAW, Asset Governance